



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul	: Jangan Abaikan Kondisi Normal Baru
Tanggal	: Kamis, 17 November 2016
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 1

Jangan Abaikan Kondisi Normal Baru JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 sebesar 5,1 persen. Untuk mencapai target itu, pemerintah diharapkan tidak mengabaikan kondisi normal baru dan beberapa sektor penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu industri padat karya dan pertanian. KOMPAS/AGUS SUSANTO Harian "Kompas" menyelenggarakan diskusi terbatas dengan tema "Prospek Ekonomi Indonesia 2017" di Jakarta, Rabu (16/11). Hadir sebagai pembicara Komisaris Utama Bank BTPN Mari Elka Pangestu, Vice President Bank Pembangunan Asia Bambang Susantono, Gubernur Bank Indonesia 1993-1998 Soedradjad Djiwandono, Dekan Fakultas Ekonomi UI Ari Kuncoro, pengajar Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Acara ini dimoderatori Rektor Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko. Kondisi normal baru tidak hanya ditandai dengan gejolak pelambatan ekonomi global, tetapi juga stagnasi perdagangan dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dan perubahan iklim. Situasi itu akan memengaruhi kebijakan pemerintah dan kebijakan finansial. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Panel Ekonomi Kompas bertema "Prospek Ekonomi Indonesia 2017", di Jakarta, Rabu (16/11). Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Vice President Bank Pembangunan Asia (ADB) Bambang Susantono, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono hadir sebagai narasumber. Narasumber lain adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta Ari Kuncoro, pengajar Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Diskusi dipandu Rektor Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko sebagai moderator. Faisal Basri mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi dari triwulan ke triwulan pada tahun ini masih fluktuatif. Perdagangan global belum akan stabil. Pada masa lalu, setiap 1 persen kenaikan perdagangan global akan meningkatkan 1 persen pertumbuhan ekonomi dunia. "Namun, saat ini, setiap 1 persen kenaikan perdagangan global, hanya meningkatkan 0,7 persen pertumbuhan ekonomi dunia. Kebijakan ekonomi Donald Trump setelah terpilih menjadi presiden AS juga akan semakin menambah ketidakpastian perdagangan dunia," paparnya. Menurut Faisal, ekspor Indonesia dalam waktu 15 tahun terakhir ini terus turun. Hal ini disebabkan industrialisasi sektor manufaktur lemah. "Dari sisi konsumsi masyarakat, masyarakat bawah, terutama petani, tertekan. Nilai tukar petani terus turun, padahal subsidi dan anggaran di sektor itu semakin meningkat," kata Faisal yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 sebesar 5 persen. Bambang Susantono mengemukakan, saat ini pemerintah gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan kondisi normal baru. Perubahan iklim yang akan terus terjadi pada masa datang akan menentukan rencana pembangunan infrastruktur. "Begitu juga untuk mengatasi pemanasan global dan krisis energi fosil, pemerintah akan mengalokasikan dana besar untuk energi terbarukan," ujarnya. Soedradjad Djiwandono menekankan arti penting otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, Indonesia juga perlu masuk ke dalam lingkaran rantai pasok global dalam rangka mendorong peningkatan ekspor. Saling menopang Mari Elka Pangestu memaparkan, perdagangan barang perlu ditopang penguatan kluster-kluster daerah. Di dalam kluster, industri saling terhubung dan saling menopang. Mari Elka juga berharap sektor perdagangan jasa, yang selama ini selalu defisit, diperhatikan. Tahun lalu, perdagangan jasa defisit 10 miliar dollar AS. Sementara itu Ari Kuncoro menyoroti upah riil tenaga kerja yang berkurang. Hal ini dikarenakan perusahaan mengurangi jam kerja karena produksi turun. "Upah riil buruh pada 2005 rata-rata Rp 25.000 per hari, tetapi pada 2015 turun jadi Rp 18.000 per hari. Adapun jam kerja buruh berkurang dari 40 jam per minggu pada 2005 menjadi 25 jam per minggu pada 2015," ujarnya. Abdullah Azwar Anas menekankan kemandirian pemerintah daerah dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Salah satu caranya dengan memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi daerah. (HEN)